



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



LAPORAN KINERJA

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN ANGGARAN

2022



@pustekinfo.dprri



Kata Pengantar

Kepala Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Kepala Pusat Teknologi Informasi atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang merupakan tolok ukur dalam penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Tinjauan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan laporan kinerja ini diharapkan Pusat Teknologi Informasi mendapatkan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Semoga Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan manfaat dan informasi atas capaian kinerja Pusat Teknologi Informasi yang berperan sebagai salah satu sistem pendukung DPR RI. Kami akan senantiasa melakukan perbaikan dan menyempurnakan pelaporan ini untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di lingkungan Pusat Teknologi Informasi yang telah berkinerja dan berkomitmen, mendedikasikan tenaga, pikiran, dan waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta jabatannya dalam membantu penyelesaian laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
EXECUTIVE SUMMARY	8
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Gambaran Umum	10
1.2. Dasar Hukum.....	10
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	11
1.3.1. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi.....	12
1.3.2. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi.....	13
1.3.3. Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi	14
1.3.4. Komposisi Pegawai Pusat Teknologi Informasi.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Sasaran Program Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik.....	25
3.1.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja	25
3.1.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	26
3.1.3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.....	28
3.1.4. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	29
3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	30
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	34
3.2. Sasaran Program Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	41
3.2.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja	41
3.2.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	42
3.2.3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.....	43

3.2.4.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	43
3.2.5.	Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	44
3.2.6.	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	44
3.2.7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	45
3.3.	Sasaran Program Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	46
3.3.1.	Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja	47
3.3.2.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	47
3.3.3.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.....	48
3.3.4.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	48
3.3.5.	Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	49
3.3.6.	Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	50
3.3.7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	50
3.4.	Sasaran Program Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	55
3.4.1.	Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja	55
3.4.2.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	56
3.4.3.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.....	56
3.4.4.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	57
3.4.5.	Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	57
3.4.6.	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	57
3.4.7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	58
3.5.	Sasaran Program Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	59
3.5.1.	Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja	59
3.5.2.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	60
3.5.3.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.....	61
3.5.4.	Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	61

3.5.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	62
3.5.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	62
3.5.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	63
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Rekomendasi.....	67
LAMPIRAN 1	70
LAMPIRAN 2.....	72
LAMPIRAN 3.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Pusat Teknologi Informasi	14
Tabel 2 Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	19
Tabel 3 Target capaian indikator jangka menengah dalam Renstra Setjen DPR 2021-2024	19
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022.....	20
Tabel 5 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	23
Tabel 6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan Renstra Setjen DPR RI 2021-2024	24
Tabel 7 Perbandingan target akhir 2024 dengan capaian 2022	25
Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	25
Tabel 9 Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari tahun ke tahun.....	26
Tabel 10 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	28
Tabel 11 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional SPBE.....	29
Tabel 12 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	30
Tabel 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	32
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	41
Tabel 18 Perbandingan Capaian Indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari tahun ke tahun	42
Tabel 19 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	43
Tabel 20 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	44
Tabel 21 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	44
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	47
Tabel 23 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Aplikasi yang Terintegrasi dari tahun ke tahun.....	47
Tabel 24 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	48
Tabel 25 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	49
Tabel 26 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	50
Tabel 27 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Selama Tahun 2022	51
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	55
Tabel 29 Perbandingan Capaian Indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi dari tahun ke tahun	56
Tabel 30 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	56
Tabel 31 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	57
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	59
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi Tahun 2021 dan 2022.....	60
Tabel 34 Perbandingan Capaian Indikator Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi dari tahun ke tahun.....	60
Tabel 32 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	61
Tabel 33 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	62
Tabel 34 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pustekinfo Setjen DPR RI	11
Gambar 2 Histori Penilaian SPBE DPR RI	26
Gambar 3 Perbandingan Nasional Nilai SPBE Tahun 2022	29
Gambar 4 Hasil Penilaian SPBE Tahun 2022 Kategori Lembaga Negara	30
Gambar 5 Zoom Evaluasi Rencana Induk TIK	34
Gambar 6 Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat me-launching CSIRT	35
Gambar 7 Hasil Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Tahun 2022	36
Gambar 8 Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber DPR RI Tahun 2022.....	37
Gambar 9 Foto Bersama Peserta Sosialisasi IT Security Awareness.....	37
Gambar 10 Diagram Survei Kepuasan Pustekinfo	59

EXECUTIVE SUMMARY

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Teknologi Informasi merupakan salah satu unsur pendukung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertugas melaksanakan tata kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi.

Terdapat 2 sasaran program dan 5 indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Pusat Teknologi Informasi di tahun 2022, yakni:

1. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik
 - 1.1 Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi
 - 2.1 Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - 2.2 Persentase aplikasi yang terintegrasi
 - 2.3 Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Teknologi dan Informasi
 - 2.4 Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi dan Informasi

Pada sasaran program yang terkait dengan penerapan indikator kinerja Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicapai melalui hasil indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 yang di tahun 2022 ini mengalami peningkatan hasil dan tercapai targetnya yakni DPR RI mendapatkan nilai SPBE sebesar 2,95 (predikat Baik).

Pada sasaran program untuk meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi dengan indikator dukungan teknologi informasi yang telah disiapkan oleh Pusat Teknologi Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni dalam bentuk ketersediaan jaringan internet pada tahun

2022 sebesar 2,3 Gbps jalur internasional dan 2,7 Gbps jalur domestik yang terdiri dari 3 ISP dengan zonasi berdasarkan lokasi. Sedangkan untuk jumlah aplikasi yang terintegrasi selama tahun 2022 telah mencapai 95% yang terdiri dari 109 aplikasi yang digunakan baik oleh Anggota DPR RI maupun Pegawai Sekretariat Jenderal.

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi diperoleh melalui survei kepuasan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 dengan kategori teknologi informasi yang memberikan hasil yakni 3,31 dari target sebesar 3,10.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Teknologi Informasi yang telah dilakukan oleh dua Bidang unit kerja yakni Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi memberikan kenaikan capaian realisasi penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2022 dengan capaian sebesar 99,41% dan realisasi anggaran keseluruhan Rp 77.317.351.744,-.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, Pusat Teknologi Informasi pun tak luput dari kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun non teknis. Kendala teknis terkait jaringan dalam pelaksanaan dukungan teknologi informasi selama tahun 2022 seperti terjadinya gangguan masal pada koneksi jaringan internet yang berasal dari ISP (*Internet Service Provider*) yang terjadi 1 kali dalam tahun 2022.

Sedangkan kendala non teknis yang dialami oleh Pusat Teknologi Informasi diantaranya terkait administrasi yaitu meningkatnya frekuensi dalam pengajuan revisi anggaran selama tahun 2022 yang mengindikasikan belum optimalnya strategi perencanaan penganggaran dalam Pusat Teknologi Informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung parlemen modern yang ditandai dengan transformasi digital pada pelayanan administrasi, teknis, persidangan dan keahlian, Pusat Teknologi Informasi secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

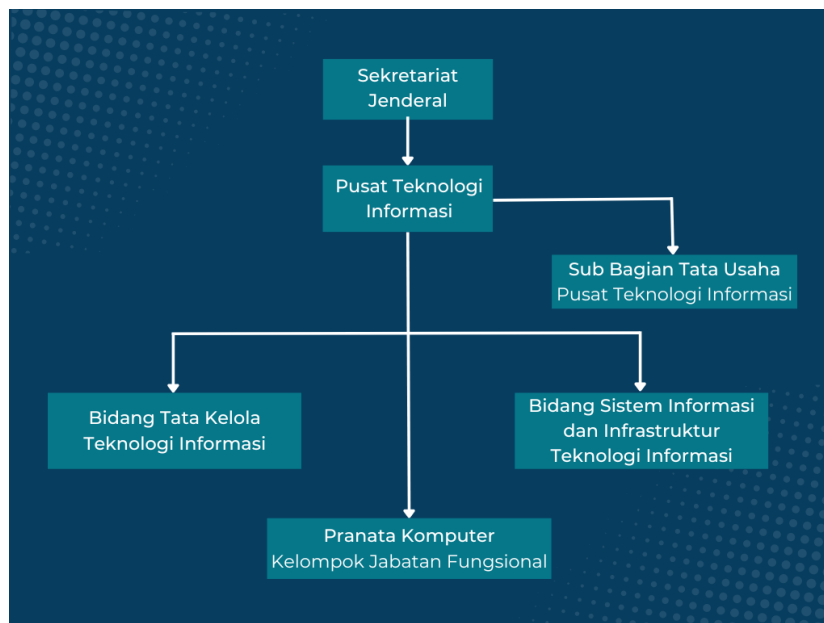
Meningkatnya kebutuhan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai instrumen dalam pekerjaan sehari-hari, Pusat Teknologi Informasi memiliki 2 unit kerja pada lingkup eselon III yang secara operasional mendukung pemberian layanan teknologi informasi kepada pengguna layanan.

1.2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- b. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- g. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi Pustekinfo Setjen DPR RI
(Sumber: Setjen DPR RI, 2021)

Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun tugas Pusat Teknologi Informasi adalah melaksanakan tata kelola teknologi

informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi, Pusat Teknologi Informasi memiliki fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Informasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata Kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- c. pelaksanaan tata kelola teknologi informasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- e. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang teknologi informasi;
- f. pelaksanaan tata usaha Pusat Teknologi Informasi;
- g. penyusunan laporan kinerja Pusat Teknologi Informasi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Dengan dibantu oleh 2 unit bidang Eselon III di Pusat Teknologi Informasi dan 1 subbagian tata usaha Pusat Teknologi Informasi Eselon IV, pelaksanaan kegiatan dan operasional layanan teknologi informasi dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi bidang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06/PER-SEKJEN/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pasal 336 dan Pasal 337.

1.3.1. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana induk teknologi informasi, kebijakan teknis dan standardisasi di Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional penggunaan layanan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi;

2. penyusunan bahan kegiatan di Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional pengguna layanan teknologi informasi;
3. pelaksanaan dan evaluasi tata kelola teknologi informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional pengguna layanan teknologi informasi;
4. pelaksanaan bimbingan dan supervisi terkait pembangunan dan pengembangan layanan teknologi informasi; dan
5. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi.

1.3.2. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Bertugas melaksanakan pengelolaan di bidang pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur teknologi informasi, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
2. penyusunan bahan kegiatan di bidang pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus;
3. pelaksanaan, pengujian dan evaluasi pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus;
4. pelaksanaan pemeliharaan, identifikasi, analisis, pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastuktur teknologi informasi, layanan pusat data, dan jaringan komputer;
5. pengelolaan aset teknologi informasi; dan
6. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi.

1.3.3. Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi

Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Teknologi Informasi, bidang, dan kelompok jabatan fungsional.

1.3.4. Komposisi Pegawai Pusat Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan kegiatan dukungan layanan teknologi informasi, Pusat Teknologi Informasi memiliki kapasitas sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, penyusun bahan kebijakan, pengelola data, dan pegawai non ASN.

Apabila peran pejabat struktural sebagai posisi sentral yang menghubungkan antara lini depan dan lini atas, maka peran dari pejabat fungsional pranata komputer adalah sebagai pelaksana teknis operasional layanan teknologi informasi. Kedua peran ini dibantu oleh dukungan secara administratif oleh sub bagian tata usaha dan dukungan pelaksanaan kegiatan teknis oleh pegawai non ASN. Adapun secara rinci, komposisi pegawai Pusat Teknologi Informasi dan kebutuhan sesuai analisis beban kerja tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Pegawai Pusat Teknologi Informasi

	SDM	Kebutuhan ABK
Kepala Pusat Teknologi Informasi	1	1
Pranata Komputer Ahli Utama	0	1
Pranata Komputer Ahli Madya	3	6
	4	8

	SDM	Kebutuhan ABK
Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi	1	1
Pranata Komputer Ahli Muda	4	7
Pranata Komputer Ahli Pertama*	5	7
Pranata Komputer Penyelia	0	2
Pranata Komputer Mahir	0	3
Pranata Komputer Terampil*	4	2
Pranata Komputer Umum	0	1
*termasuk CPNS Pranata Komputer	14	28

	SDM	Kebutuhan ABK
Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	1	1
Pranata Komputer Ahli Muda	3	5
Pranata Komputer Ahli Pertama	0	10
Pranata Komputer Penyelia	0	1
Pranata Komputer Mahir	0	5
Pranata Komputer Terampil*	3	9
Pengadministrasi Umum	0	1
*termasuk CPNS Pranata Komputer	7	32

	SDM	Kebutuhan ABK
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi	1	1
Penyusun Bahan Kebijakan	1	2
Pengelola Data	1	5
Arsiparis Terampil	0	1
Pengadministrasi Umum	0	7
	3	16

Rekapitulasi Total	SDM	Kebutuhan ABK
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas	4	4
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pratama	24	75
	28	79

	SDM
PPNASN	16
Fungsional Bebas Tugas karena Tugas Belajar	1
	17

Jumlah keseluruhan pegawai di Pusat Teknologi Informasi adalah 28 orang yang terdiri dari 1 Kepala Pusat, 2 Kepala Bidang, 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, 2 Pelaksana, dan 22 Pranata Komputer yang terdiri dari berbagai jenjang Pranata Komputer Terampil hingga Madya baik ASN maupun CPNS dengan konsentrasi lingkup kompetensi yang meliputi Tata Kelola Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Informasi, Infrastruktur, Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi.

Sesuai data analisis beban kerja (ABK) Pusat Teknologi Informasi tahun 2022 pada Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, kebutuhan terhadap pegawai Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 7 orang, Pranata Komputer Penyelia sebanyak 2 orang, Pranata Komputer Mahir 3 orang, dan Pranata Komputer Terampil 2 orang. Kebutuhan ini dipenuhi melalui rekrutmen CPNS Tahun 2022 untuk jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 5 orang dan Pranata Komputer Terampil 2 orang.

Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi kebutuhan Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 10 orang, Pranata Komputer Penyelia sebanyak 1 orang, Pranata Komputer Mahir 5 orang, dan Pranata Komputer Terampil 9 orang. Adapun kebutuhan ini terakomodir dengan adanya rekrutmen CPNS Angkatan 2022 untuk Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi hanya 1 orang Pranata Komputer Terampil, sehingga kekurangan SDM Pranata Komputer masih terdapat 16 orang. Oleh karena itu pada tahun 2022 diberdayakan tenaga PPNASN sebanyak 16 orang untuk membantu dalam hal operasional teknis dan administratif penanganan gangguan layanan teknologi informasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020-2024 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mengacu kepada visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diterjemahkan secara nyata dan aplikatif di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

Tabel 2 Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan transparansi dan akses data oleh publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempublikasikan dan melakukan updating data atau dokumen ke website agar dapat diakses oleh publik. 2. Mengintegrasikan data dalam suatu mekanisme pencarian. 3. Meningkatkan sosialisasi layanan TIK Setjen DPR RI baik kepada pengguna internal maupun kepada masyarakat sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi.
2	Peningkatan layanan data dan informasi berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Big Data dan Command Center. 2. Menyusun dan mengimplementasikan roadmap teknologi informasi dan komunikasi Setjen DPR RI. 3. Membangun paperless office dengan penerapan tanda tangan digital. 4. Meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan SPBE. 5. Meningkatkan keamanan informasi.

Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintah berbasis elektronik, dengan indikator kinerja program Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ini diturunkan sebagai sasaran program dan indikator kinerja Pusat Teknologi Informasi yang dijabarkan dalam target mencapai indeks “Baik” pada tahun 2022. Sehingga Pusat Teknologi Informasi harus mampu mempertahankan indeks SPBE ini karena pada tahun sebelumnya di 2021 telah mengalami peningkatan dengan berhasil meraih indeks sebesar 2,84 dengan predikat “Baik”.

Tabel 3 Target capaian indikator jangka menengah dalam Renstra Setjen DPR 2021-2024

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Renstra			
			2021	2022	2023	2024
5795	Pengelolaan Teknologi Informasi					
	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Renstra			
			2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI	85%	90%	90%	90%
		Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%	95%	95%	95%
		Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Teknologi Informasi	3,10	3,15	3,20	3,22

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pusat Teknologi Informasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dengan Sekretaris Jenderal DPR RI. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI		
Sasaran Program	Indikator	Target
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	a. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85%
	b. Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%
	c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,10

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI		
Sasaran Program	Indikator	Target
	d. Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	93%

Penetapan target pada indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selaras dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Setjen DPR tahun 2021-2024. Sedangkan target indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan sebesar 85% pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, indikator Persentase aplikasi yang terintegrasi ditargetkan sebesar 90%, indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi memiliki target 3,10, dan indikator Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi ditargetkan sebesar 93%.

Penetapan target indikator kinerja pada sasaran program Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi tahun 2022 ini terdapat perbedaan dengan target pada Renstra Setjen DPR tahun 2021-2024. Hal ini terjadi karena adanya pertimbangan atas penyesuaian terhadap target dan realisasi indikator Persentase aplikasi yang terintegrasi dimana realisasinya pada tahun 2021 yakni sebesar 92% dari target yang ditentukan sesuai Renstra yaitu 90%.

Meskipun untuk indikator ini pada tahun 2021 telah mendapat capaian 102%, namun jika disandingkan dengan target yang ditetapkan pada Renstra untuk tahun 2022 yakni 95% dianggap terlalu besar karena selisih capaian realisasinya pada tahun 2021 cukup terbatas. Oleh karena itu, setelah berkoordinasi dengan Bagian PKO-RB, bahwa untuk target indikator kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022 dapat diselaraskan menggunakan target Renstra Tahun 2021.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi diturunkan dan dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja Bidang yang diukur dengan menggunakan satuan-satuan target yang

disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Tingkat pencapaian target kinerja ini selanjutnya akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

Untuk memudahkan dalam pengukuran, tingkat capaian sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja secara kuantitas dan kualitas/ mutu. Secara kuantitas, setiap target indikator kinerja diukur dengan menggunakan satuan dokumen. Semua *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh unit kerja memiliki dokumen hasil kerja dalam bentuk fisik, laporan atau catatan atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator kinerja merupakan acuan ukuran kinerja dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja di lingkungan Pusat Teknologi Informasi.

Tabel berikut memperlihatkan target kinerja, realisasi dan capaian Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sumber: Pusat Teknologi Informasi 2022

PERJANJIAN KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target PK	Realisasi 2022	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85%	100%	117%	Sangat Tinggi
	Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%	95%	105%	Sangat Tinggi
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,10	3,31	106%	Sangat Tinggi
	Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	93%	99,41%	106%	Sangat Tinggi

Kendatipun penetapan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi terdapat ketidakselarasan dengan target pada Renstra tahun 2022, namun jika disandingkan antara target Renstra untuk tahun 2022 dengan realisasi di tahun

2022 ini, hasil capaiannya memenuhi target yang diharapkan dan masih dalam kategori sangat tinggi seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan Renstra Setjen DPR RI 2021-2024

TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target Renstra Tahun 2022	Realisasi 2022	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	90%	100%	111%	Sangat Tinggi
	Persentase aplikasi yang terintegrasi	95%	95%	100%	Sangat Tinggi
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,15	3,31	105%	Sangat Tinggi
	Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	92,5%	99,41%	107%	Sangat Tinggi

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja dalam 2 (dua) sasaran program yang ditargetkan oleh Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2022, yakni “Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik” dan “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi”.

Kinerja yang diharapkan merupakan *outcome* yang berkesinambungan hasil dari rangkaian perencanaan kegiatan, pedoman, dan pelaksanaan, serta evaluasi. Indikator yang terukur akan menghasilkan benang merah dari setiap tahapan tersebut, dan dapat memberikan rekomendasi demi perbaikan di masa yang akan datang secara berkesinambungan.

Tabel 7 Perbandingan target akhir 2024 dengan capaian 2022

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target Akhir Tahun 2024	Realisasi 2022	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,5 - <4,2)	Baik (2,95)	84,3%	Tinggi
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	90%	100%	111%	Sangat Tinggi
	Persentase aplikasi yang terintegrasi	95%	95%	100%	Sangat Tinggi
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,22	3,31	102%	Sangat Tinggi

3.1. Sasaran Program Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik

Pada sasaran program terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik terdapat 1 (satu) indikator kinerja yakni **“Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”** yang dilaksanakan melalui evaluasi SPBE DPR RI.

3.1.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja : Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
Target Renstra Tahun 2022	Target PK Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Kategori
Baik	Baik	Baik	100%	Sangat Tinggi

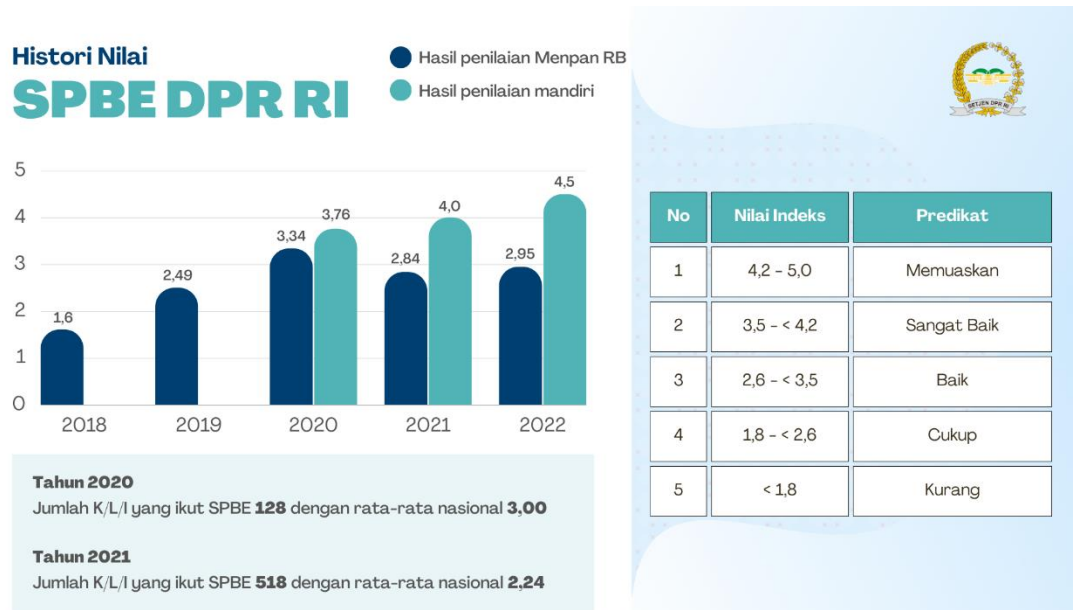
Hasil penilaian SPBE untuk tahun 2022 mendapatkan indeks nilai 2,95 (Baik). Sehingga jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2021-2024, maka hasil capaiannya sebesar 100%.

3.1.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 9 Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari tahun ke tahun

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cukup	Baik (3,34)	100%	Baik	Baik (2,84)	100%	Baik	Baik (2,95)	100%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian indeks pelaksanaan SPBE selama 3 tahun terakhir diketahui bahwa capaian realisasi sesuai dengan target yang diharapkan karena ditentukan dengan predikat yang didapatkan. Namun untuk perolehan angka indeksnya pada indikator SPBE di tahun 2021 memang mengalami penurunan yakni pada tahun 2020 mendapatkan nilai 3,34, pada tahun 2021 mendapat nilai 2,84, dan tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 2,95.



Gambar 2 Histori Penilaian SPBE DPR RI

Setelah melaksanakan catatan rekomendasi dan perbaikan proses pada tahun 2022, hasil penilaian SPBE tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 2,95 dengan predikat Baik. Adapun metodologi, tatacara, dan jumlah indikator penilaian yang dilakukan di tahun 2022 ini menggunakan parameter yang sama dengan tahun

2021 yakni terdiri dari 4 Domain dan 8 Aspek dengan total 47 indikator sesuai PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indeks pelaksanaan SPBE yaitu dengan meningkatkan Aspek Audit TIK dan Domain Layanan SPBE pada kedua Aspeknya yakni Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

- a. menerapkan manajemen keamanan informasi melalui pelaksanaan asesmen, sosialisasi keamanan informasi, dan secara kontinyu melaksanakan audit TIK internal sejak tahun 2021;
- b. berkolaborasi dengan BSSN dalam membentuk *DPRRI-Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*;
- c. menerapkan penggunaan aplikasi berbagi pakai dan terintegrasi untuk layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, pengelolaan BMN, pengawasan internal pemerintah, dan jaringan dokumentasi dan informasi;
- d. melakukan kegiatan pengadaan server yang terdiri dari *hardware* dan *software*, perangkat DNS, DHCP dan IP Address untuk menerapkan infrastruktur jaringan dalam mendukung serta mengakomodir kebutuhan pengguna layanan internet di lingkungan DPR RI, terutama kinerja Anggota Dewan DPR RI;
- e. melakukan kegiatan pengadaan *wireless access point* yang terdiri dari *hardware* dan *software (AP management license dan Associate Partner Support)* untuk mengakomodir kurangnya jumlah *wireless access point* yang menyebabkan pancaran sinyal (*coverage*) tidak maksimal di ruangan kerja Anggota Dewan DPR RI pada setiap lantainya yang sebelumnya hanya terpasang satu unit di setiap zona.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka berupaya untuk menjalankan rekomendasi perbaikan pada Domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen SPBE, diantaranya sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 dengan menyelaraskan antara RITIK Setjen DPR RI dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE yang terdiri dari 6 domain arsitektur untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Enam domain tersebut yakni domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain infrastruktur SPBE, domain aplikasi SPBE, dan domain keamanan SPBE;
- b. menyusun Arsitektur Data DPR RI yang berisi Daftar Data dan Data Prioritas yang telah diserahkan ke Sekretariat Satu Data Indonesia;
- c. menyusun kebijakan tata kelola teknologi informasi dalam bentuk Peraturan Sekjen, Keputusan Sekjen, SOP, dan daftar LKIK.

3.1.3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 10 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik			
Indikator: Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Realisasi 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	Kategori
Baik (2,95)	Sangat Baik (3,5 - <4,2)	84,3%	Tinggi

Untuk indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memperoleh tingkat kemajuan sebesar 84,3% jika dibandingkan dengan target akhir yang terdapat pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2021-2024. Kemajuan ini diperoleh dengan membandingkan realisasi hasil nilai SPBE tahun 2022 dengan ambang batas minimum predikat Sangat Baik yaitu pada rentang 3,5 -< 4,2.

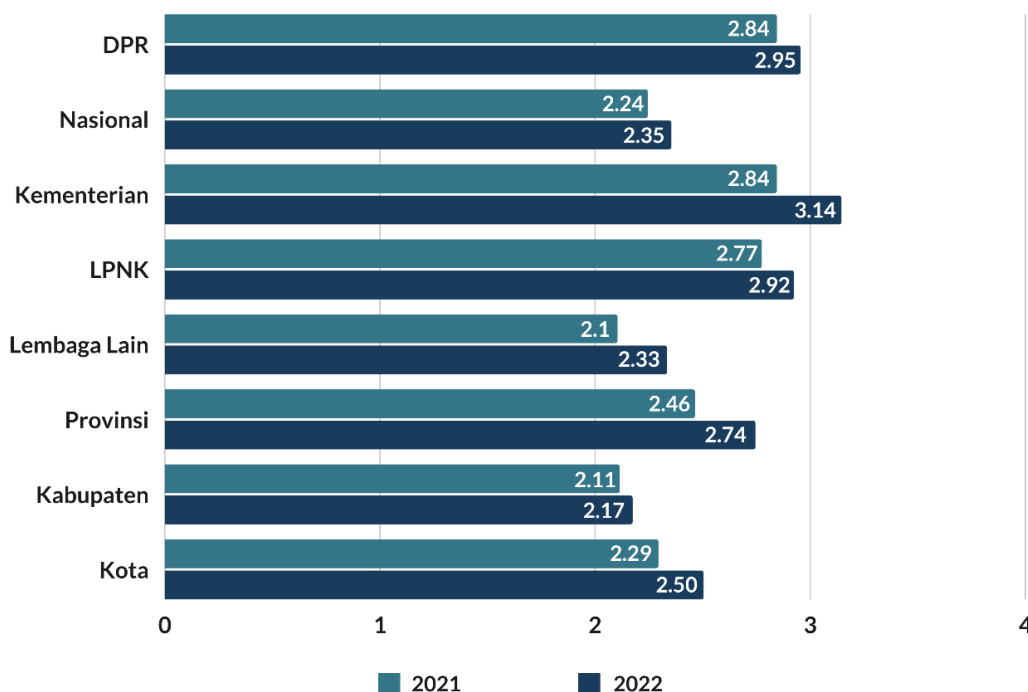
Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi target akhir tersebut antara lain dengan menjalankan catatan rekomendasi hasil penilaian SPBE tahun 2021 dan melaksanakan kegiatan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan berkolaborasi dengan unit kerja lainnya melalui pembentukan Tim Pengelola SPBE Tahun 2022 yang ditetapkan dengan SK Nomor 468/2022.

3.1.4. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 11 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional SPBE

Sasaran Program: Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik			
Indikator: Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Rata-Rata Nasional	Realisasi 2022	Capaian	Kategori
2,24	2,95	125%	Sangat Tinggi

Perbandingan nilai indeks SPBE yang diperoleh Setjen DPR RI jika dibandingkan dengan standar nasional, diperoleh hasil bahwa nilai SPBE Setjen DPR RI Tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional SPBE yang sebesar 2,35.



Gambar 3 Perbandingan Nasional Nilai SPBE Tahun 2022

Nilai pada kategori yang sama yakni Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara sebesar 2,37 dengan hasil SPBE DPR juga menduduki nilai tertinggi. Namun demikian, tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan senantiasa dilakukan untuk dapat mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

HASIL PEMANTAUAN SPBE SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Dewan Perwakilan Rakyat	2.95	Baik
2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2.77	Baik
3	Badan Pemerika Keuangan	2.68	Baik
4	Mahkamah Agung RI	2.61	Baik
5	Kejaksaan Agung	2.18	Cukup
6	Dewan Perwakilan Daerah	2.18	Cukup
7	Komisi Yudisial	1.82	Cukup
8	Mahkamah Konstitusi	1.80	Cukup
Rata-Rata		2.37	

Gambar 4 Hasil Penilaian SPBE Tahun 2022 Kategori Lembaga Negara

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 12 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	100%	Faktor pendukung keberhasilan, yaitu: a. Telah disusunnya Persekjen DPR RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis	Melakukan evaluasi RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024; a. Melakukan gap analisis teknologi informasi berdasarkan standar ISO 27001; b. Menyusun arsitektur data dan identifikasi daftar data dalam rangka

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
						<p>Elektronik (SPBE) Di Lingkungan Setjen DPR RI;</p> <p>b. Penyusunan Persekjen DPR RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Setjen DPR RI;</p> <p>c. Pembangunan aplikasi yang berkolaborasi dengan K/L lain seperti DPR RI e-Sign untuk sertifikat tanda tangan elektronik yang berkolaborasi dengan BSR E;</p> <p>d. Pemanfaatan portal data kependudukan yang diintegrasikan dengan aplikasi pelayanan public PPID dan Sidumas;</p> <p>e. Pembentukan DPRRI-CSIRT dan pelaksanaan audit TIK internal yang secara berkelanjutan sebagai wujud penerapan manajemen keamanan informasi;</p>	pembangunan satu data.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
						f. Tersedianya lisensi Zoom Webinar dan Paripurna, Lisensi Zoom DPR RI 35 Host, Lisensi Zoom DPR RI 42 Host; g. Tersedianya kapasitas storage untuk ruang penyimpanan dokumen terpadu dan ruang penyimpanan data parlemen.	

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	100%	51.591.892.000	51.393.261.082	99,61%

Pada sasaran Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik alokasi pagu anggaran awal (03.EBA.963) yang ditetapkan di RKT sebesar Rp. 43.143.420.000,- dan dilakukan revisi anggaran sehingga pagu revisi pada tahun 2022 adalah Rp. 51.591.892.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 51.393.261.082,-.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik” dengan indikator kinerja “Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,61%.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan dengan penggunaan sumber daya anggaran ini adalah untuk belanja modal perangkat teknologi informasi jaringan dan keamanan jaringan, kegiatan pemeliharaan jaringan kabel dan nirkabel, perjalanan dinas, pengembangan jaringan *fiber optic* dan jaringan di Rumah Jabatan Anggota DPR RI dan Kopo, serta jasa konsultan evaluasi RITIK, dan roadmap big data, jasa konsultan Audit TIK SPBE dan Gap analisis, konsultan pemetaan produsen data, dan paket meeting. Pembelian lisensi zoom DPR RI, lisensi zoom webinar dan sidang paripurna, lisensi *software* dan anti virus, *software* penunjang lainnya, honor output kegiatan. Pengadaan perangkat server, storage dan back-up. Renewal *subscription* sistem data analitik, belanja bahan jamuan dan percetakan, jasa konsultan perencanaan software data catalog, dan perencanaan perangkat data katalog, sewa ruang penyimpanan data parlemen, sewa ruang penyimpanan dokumen terpadu, dukungan *bandwidth event P20*.

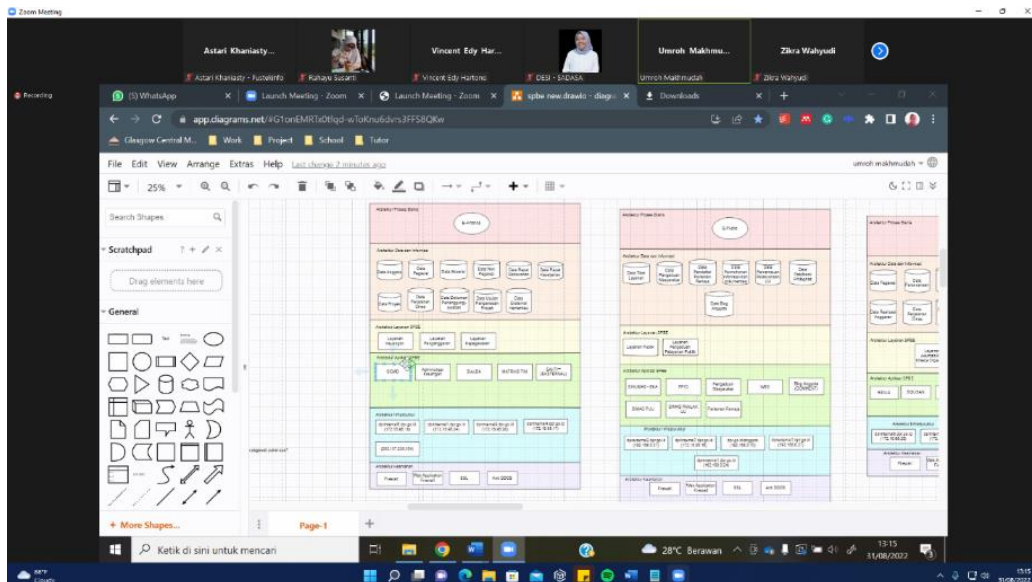
Adapun dalam pencapaian indikator ini juga dimanfaatkan penggunaan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan dukungan layanan SPBE, seperti:

- a. pembentukan Tim Pengelola SPBE Tahun 2022 yang ditetapkan dengan SK Nomor 468/2022 untuk memudahkan koordinasi dan pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian mandiri SPBE;
- b. penggunaan cloud.dpr.go.id sebagai media mengumpulkan bukti dukung dan berbagi dokumen digital sehingga menunjang penerapan teknologi informasi dan mengurangi penggunaan kertas;
- c. pelaksanaan rapat koordinasi SPBE dengan jalur virtual sehingga dapat lebih efektif karena dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun.

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, yaitu :

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dalam rangka evaluasi hasil SPBE tahun 2021 dan mendapatkan rekomendasi perbaikan. evaluasi RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE yang terdiri dari kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. RITIK juga telah diselaraskan dengan konsep tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia yang memasuki babak baru penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diterapkan secara optimal yang berdampak pada integrasi sistem yang ada pada Setjen DPR RI.



Gambar 5 Zoom Evaluasi Rencana Induk TIK

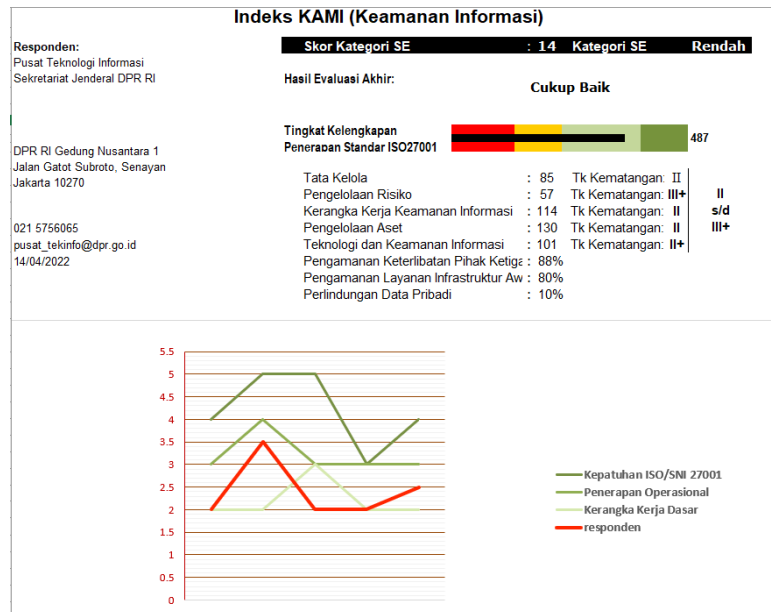
- b. menyusun Arsitektur Data DPR RI sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kolaborasi program Satu Data Indonesia. Telah dilakukan penyusunan Arsitektur Data DPR RI yang berisi Daftar Data dan Data Prioritas yang telah diserahkan ke Sekretariat Satu Data Indonesia pada tahun 2022.yang berisi Daftar Data dan Data Prioritas yang telah diserahkan ke Sekretariat Satu Data Indonesia.
- c. berkolaborasi dengan BSSN dalam membentuk DPRRI-*Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) sebagai wujud penerapan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi di Setjen DPR RI dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar.



Gambar 6 Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat me-launching CSIRT

- d. melaksanakan asesmen terkait keamanan informasi, yakni Indeks KAMI sebagai alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi. Evaluasi ini ditujukan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja

keamanan informasi. Hasil evaluasi Setjen DPR RI atas Indeks KAMI tahun 2022 adalah Cukup Baik dengan perolehan poin total sebesar 487.



Gambar 7 Hasil Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Tahun 2022

- e. melaksanakan asesmen indeks kematangan penanganan insiden *Cyber Security Maturity* (CSM) dari BSSN yang merupakan instrumen pengukuran Maturitas Penanganan Insiden Siber dan Sandi. Fase penilaian tingkat maturitas penanganan insiden terdiri dari Persiapan, Respon atau tanggap Insiden Siber, dan Tindak Lanjut. Pada tahun 2022 DPR RI mendapatkan penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara atas pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber dengan Nilai 3,2.



Gambar 8 Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber DPR RI Tahun 2022

- f. menyelenggarakan Sosialisasi *IT Security Awareness* pada 13 Desember 2022 dihadiri oleh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI, sebagai Langkah dukungan dalam meningkatkan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai jenis ancaman keamanan informasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 9 Foto Bersama Peserta Sosialisasi IT Security Awareness

- g. menyusun kebijakan tata kelola teknologi informasi dalam bentuk Peraturan Sekjen, Keputusan Sekjen, SOP, dan daftar LKIK, diantaranya telah menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2022 tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui Persekjen ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data DPR dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yaitu dengan memenuhi standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk DPR RI.

Tabel 14. Daftar SOP yang Telah Disusun Tahun 2022

NO	SOP	No. SOP AP	Tanggal Penetapan	Keterangan
1	Penatausahaan Barang Persediaan Pustekinfo	OT.03.03 - 0162	11/10/2022	
2	Pembuatan dan Pembaharuan Aplikasi	OT.03.03 – 0163	17/11/2022	
3	Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Penyedia Barang/Jasa	OT.03.03 – 0028	21/04/2022	
4	Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Internal	OT.03.03 – 0027	21/04/2022	
5	Pemeliharaan Jaringan Internet	OT.03.03 – 0081	23/08/2022	
6	Dukungan Layanan Teknologi Informasi	OT.03.03 - 0080	23/08/2022	Sebelumnya adalah SOP Pelayanan Service Desk Teknologi Informasi

Tabel 15. Daftar LKIK yang Telah Disusun Tahun 2022

NO	LKIK
1	Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Internal
2	Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Penyedia barang/jasa
3	Pemeliharaan Jaringan Internet oleh Internal
4	Pemeliharaan Jaringan Internet oleh Penyedia Barang atau Jasa

NO	LKIK
5	Pengujian Hasil Pemeliharaan Jaringan Internet
6	Pembuatan Tiket Layanan Teknologi Informasi – Stela
7	Pelayanan Pengaduan Teknologi Informasi – Stela
8	Permintaan Pembuatan atau Pengembangan Aplikasi – Singa Rusia
9	Pengelolaan Barang Persediaan Pustekinfo
10	Penggunaan Command Center
11	Penyewaan Ruang Command Center
12	Memasuki Ruangan Command Center
13	Pencatatan Aset TI
14	Permintaan Penggunaan Aset TI
15	Pemusnahan Data Pada Aset TI
16	Pencatatan Barang Persediaan
17	Permintaan Penggunaan Barang Persediaan
18	Keamanan Sumber Daya Manusia
19	Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi
20	Pengelolaan Gangguan Layanan TI
21	Pelaporan Event dan Weakness
22	Pelaporan Insiden Keamanan Informasi
23	Pengelolaan Masalah Layanan TI
24	Permintaan Layanan TI

Tabel 16. Daftar Persekjen dan SK yang Telah Disusun Tahun 2022

JENIS PRODUK HUKUM	NOMOR	TENTANG	TANGGAL PENETAPAN/ TAHUN
Persekjen	20	Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	1 November 2022

JENIS PRODUK HUKUM	NOMOR	TENTANG	TANGGAL PENETAPAN/ TAHUN
SK	230	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	19 Januari 2022
SK	2448	Penetapan Aplikasi Pengajuan Pembaharuan Aplikasi dan Sistem Informasi (SINGA RUSIA) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	28 Oktober 2022
SK	2449	Panduan Penggunaan Penetapan Aplikasi Pengajuan Pembaharuan Aplikasi dan Sistem Informasi (SINGA RUSIA) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	28 Oktober 2022
SK	2452	Penetapan Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan (Stela) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	31 Oktober 2022
SK	2453	Panduan Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan (STELA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	31 Oktober 2022

- h. secara kontinyu melaksanakan Audit TIK internal sejak tahun 2021 yang bertujuan sebagai upaya untuk mendukung transformasi digital yang partisipatif, kolaboratif, berkelanjutan, dan efektif. Hasil dari audit akan membantu instansi pemerintah dalam melakukan perbaikan kualitas infrastruktur dan aplikasi SPBE dalam jangka panjang. Audit TIK bermanfaat dalam mengatasi berbagai macam permasalahan sehingga Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar teknis serta peraturan perundangan yang berlaku, dan dapat mencegah terjadinya risiko atas penggunaan teknologi informasi.

Audit TIK SPBE dilakukan menggunakan sistem dan aplikasi dari BRIN dengan ruang lingkup Audit TIK SPBE yang dilakukan antara lain Audit Aplikasi SIDUMAS, Audit Aplikasi PPID, Audit Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah, Audit Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Audit Infrastruktur Tata Kelola Manajemen, dan Audit Keamanan SPBE.

Dalam pelaksanaan audit ini Pusat Teknologi Informasi berkoordinasi dengan unit kerja terkait melalui Surat Perintah Penugasan Kepala Pusat Teknologi Informasi Nomor: B/74/TI/05/2022. Hasil dari audit ini digunakan dalam pemenuhan indikator dalam penilaian SPBE yaitu indikator 29, 30, dan 31.

- i. melaksanakan kegiatan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan berkolaborasi dengan unit kerja lainnya melalui pembentukan Tim Pengelola SPBE Tahun 2022 yang ditetapkan dengan SK Nomor 468/2022.

3.2. Sasaran Program Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**”.

3.2.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja : Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				
Target Renstra Tahun 2022	Target PK Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Kategori
90%	85%	100%	117%	Sangat Tinggi

Pemenuhan terhadap indikator kinerja Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan, pengujian, dan evaluasi pembangunan dan pengembangan aplikasi, infrastruktur, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus sistem informasi yang terintegrasi. Indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah

terlaksana melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022 sehingga pencapaiannya adalah 117%.

3.2.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 15 Perbandingan Capaian Indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari tahun ke tahun

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
80%	100%	125%	85%	100%	117%	85%	100%	117%

Perbandingan capaian dari indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan hasil tercapainya target dengan baik yakni melalui pemenuhan realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu dengan meningkatkan layanan teknologi informasi, yakni menyediakan *bandwidth* jaringan internet sebesar 2,3 Gbps jalur internasional dan 2,7 Gbps jalur domestik yang terdiri dari 3 ISP dengan zonasi berdasarkan lokasi untuk peningkatan kualitas dan kecepatan akses internet dan kelancaran penyelenggaraan rapat dan persidangan secara virtual.

3.2.3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 16 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi			
Indikator: Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia			
Realisasi 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	Kategori
100%	90%	111%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” pada tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 adalah 111% atau meningkat dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya kebutuhan terhadap dukungan teknologi informasi yang semakin meningkat, diantaranya peningkatan kapasitas bandwidth untuk pelaksanaan rapat/persidangan virtual, kebutuhan kapasitas penyimpanan (*storage*) server, peningkatan peralatan penunjang keamanan informasi untuk mencegah terjadinya insiden siber, dan peningkatan pada peralatan jaringan komputer *access point*.

3.2.4. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3.2.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 17 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85%	100%	117%	Faktor pendukung keberhasilan, yaitu: a. Tersedianya layanan jaringan internet dan colocation di lingkungan DPR RI; b. Terlaksananya kegiatan pengembangan jaringan kabel Nusantara I, pengembangan jaringan fiber optik, pengembangan jaringan Komplek DPR RI, pengembangan dan perapihan jaringan Internet.	a. Melakukan pemeliharaan dan pengujian layanan jaringan internet dan perangkatnya untuk menjaga kualitas layanan teknologi informasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b. Senantiasa melakukan dokumentasi dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan.

3.2.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 18 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan	85%	100%	117%	14.157.590.000	13.946.809.362	98,51%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
		Perwakilan Rakyat Republik Indonesia						

Pada sasaran ini alokasi pagu anggaran awal (01.EBA.962) dan (01.EBA.994) yang ditetapkan di RKT sebesar Rp. 14.222.054.000,- dan dilakukan revisi anggaran sehingga pagu revisi pada tahun 2022 adalah Rp. 14.157.590.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 13.946.809.362,-.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi” dengan indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan capaian indikator kinerja sebesar 117% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 98,51% dengan menggunakan alokasi anggarannya untuk pelaksanaan dukungan manajemen internal layanan umum untuk koordinasi di Pusat Teknologi Informasi, dan layanan perkantoran untuk operasional dan pemeliharaan kantor dan langganan jasa internet yang digunakan DPR RI, internet Setjen, *colocation*, langganan *license* dan *software, renewal support smartzone* dan *wireless access point, renewal coreset*, layanan SMS dan WA *gateway* DPR RI dan Setjen, pemeliharaan ruang penyimpanan komputasi parlemen, serta pemeliharaan ruang server dan perangkat server untuk layanan DPR RI.

3.2.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator

kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, yaitu :

- a. Langganan Jasa Internet DPRRI, Langganan Jasa Internet DPRRI dua, Langganan Jasa Internet DPRRI tiga, Langganan Jasa Internet Setjen DPRRI, dan Langganan Jasa Internet *Colocation*;
- b. Pengadaan peralatan penunjang jaringan kabel dan nirkabel, Pengadaan Kabel LAN, Pengadaan peralatan penunjang jaringan kabel dan nirkabel, Pengadaan *Monitoring Device*, Pengadaan *Wireless Access Point*, Pengadaan Perangkat DNS, DHCP dan *IP Address Management (DDI)*, Pengadaan Peralatan *E-KTP Reader*, Pengadaan *Distribution Switch*, Pengadaan OCR, Pengadaan Perangkat Keamanan Distribusi Jaringan, Pengadaan Perangkat *Backup*, Pengadaan *Unity Upgrade*, Pengadaan *Powerstor Upgrade*, Pengadaan Server, Pengadaan *Storage*, Pengadaan SAN Switch, Pengadaan *Software Backup*, Pengadaan Peralatan Jaringan *helpdesk*, Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer Jaringan, dan Pengadaan Cloud;
- c. Perawatan Penyimpanan Komputasi Parlemen, Pemeliharaan *Wireless Access Point*, Pemeliharaan AC Ruang Server, Pemeliharaan UPS Ruang Server, Pemeliharaan Peralatan Pengamanan Kebakaran Ruang Server, Pemeliharaan *Switch Access*, dan Pemeliharaan Server;
- d. Pengadaan *Renewal Subscription Firewall Data Center*, Pengadaan *Web Application Firewall*;
- e. Layanan Informasi melalui *SMS Gateway* Anggota DPR RI, *SMS Gateway* Anggota DPR RI Setjen DPRRI, Layanan Informasi melalui *WA Gateway* Anggota DPR RI, Layanan Informasi melalui *WA Gateway* Setjen DPRRI.

3.3. Sasaran Program Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Persentase aplikasi yang terintegrasi**”.

3.3.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja : Persentase aplikasi yang terintegrasi				
Target Renstra Tahun 2022	Target PK Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Kategori
95%	90%	95%	105%	Sangat Tinggi

Persentase aplikasi yang terintegrasi diwujudkan dalam pencapaian akan indikator kinerja jumlah aplikasi/website yang dibangun/dikembangkan di unit-unit kerja oleh Pusat Teknologi Informasi. Menggunakan relasi matriks dari struktur database dan interoperabilitas data yang digunakan antar aplikasi, telah tercapai 95% aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan total aplikasi keseluruhan berjumlah 109 aplikasi. Kegiatan telah terlaksana melebihi target yang ditetapkan sehingga pencapaiannya adalah 105%.

3.3.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 20 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Aplikasi yang Terintegrasi dari tahun ke tahun

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
85%	91%	107%	90%	92%	102%	90%	95%	105%

Perbandingan capaian dari indikator “Persentase aplikasi yang terintegrasi” selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan realisasi dan capaian dari target, hingga pada tahun 2022 capaian yang diperoleh sebesar 105%.

Adapun faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indikator Persentase aplikasi yang terintegrasi, yakni:

- a. dilakukan kegiatan pembangunan/pengembangan aplikasi yang digunakan di internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2022;

- b. melakukan pengelompokan aplikasi (*clustering*) yang terbagi menjadi 16 *cluster* dan membangun *SuperApp* yang disertakan dalam Peta Jalan Evaluasi RITIK dan Arsitektur Data.

3.3.3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 21 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi			
Indikator: Persentase Aplikasi yang Terintegrasi			
Realisasi 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	Kategori
95%	95%	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” pada tahun 2022 sebesar 95%. Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 maka tingkat kemajuannya sebesar 100% atau telah tercapai.

3.3.4. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3.3.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 22 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%	95%	105%	<p>Faktor pendukung keberhasilan, yaitu:</p> <p>a. memiliki RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 dengan Peta Jalan TIK sebagai acuan dalam pembangunan/pengembangan aplikasi;</p> <p>b. melakukan pengembangan framework dan restrukturisasi <i>database</i> aplikasi;</p> <p>c. kolaborasi dengan aplikasi terintegrasi dan berbagi pakai dari K/L/I lainnya.</p>	<p>a. melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap seluruh aplikasi terkait status aktif dan update penggunaan aplikasi;</p> <p>b. menyesuaikan pengembangan aplikasi terintegrasi dengan kebutuhan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan terbaru;</p> <p>c. melakukan tertib dokumentasi dalam siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi.</p>

3.3.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 23 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%	95%	105%	6.998.940.000	6.977.281.300	99,69%

Pada sasaran ini alokasi anggaran yang digunakan adalah pagu anggaran awal (03.EBA.963) yang ditetapkan di RKT sebesar Rp. 43.143.420.000,- namun untuk pelaksanaan indikator kinerja kegiatan di kode 01.01.02 Persentase aplikasi yang terintegrasi. Pada pelaksanaannya dilakukan revisi anggaran sehingga pagu revisi untuk kegiatan Persentase aplikasi yang terintegrasi pada tahun 2022 adalah Rp. 6.998.940.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 6.977.281.300,-.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 105% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,69 dengan menggunakan alokasi anggarannya untuk belanja modal lainnya dalam rangka kegiatan pembangunan/pengembangan aplikasi sistem informasi, redesain website, pengembangan *framework* dan restrukturisasi database aplikasi.

3.3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2022 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi”, yaitu :

- a. melakukan pengembangan *framework* aplikasi yang semula menggunakan *Zend Framework* menjadi *Laravel* yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi saat ini;
- b. melakukan pengelompokan aplikasi (*clustering*) yang terbagi menjadi 16 *cluster*, membangun *SuperApp*, dan melakukan restrukturisasi database aplikasi mendukung integrasi;
- c. melakukan pembangunan/pengembangan aplikasi sistem informasi yang berasal dari permintaan/usulan unit kerja sebanyak 20 aplikasi dengan 13 aplikasi merupakan pengembangan dari yang sudah ada, dan sebanyak 7 aplikasi merupakan aplikasi yang diusulkan untuk dibangun baru;
- d. pengembangan aplikasi data analitik dan Command Center yang diperlukan revisi untuk disesuaikan pada kegiatan pengembangan aplikasi visualisasi dan OCR engine untuk sistem *big data*;
- e. melakukan redesain website DPR RI dan website Setjen DPR RI.

Tabel 24 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Selama Tahun 2022

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	UNIT KERJA PENGUSUL	PENGEMBANGAN	PEMBANGUNAN BARU
1	BAMUS	BAMUS merupakan Website Badan Musyawarah DPR RI yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait BAMUS seperti profil, kalender, jadwal rapat, SK keanggotaan fraksi pada AKD, SK pimpinan AKD, SK pemberian persetujuan/pertimbangan/konsultasi, galeri, daftar anggota dan sekretariat.	Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	V	
2	DIPPER	DIPPER merupakan Dashboard Informasi untuk Pimpinan mengenai Persidangan DPR RI.	Biro Kesekretariatan Pimpinan		V
3	Panitia Khusus	Panitia Khusus merupakan halaman website Panitia Khusus yang dapat diakses pada website DPR dan digunakan untuk dokumentasi Bagian Sekretariat Panitia Khusus. Informasi yang bisa didapat dari halaman	Bagian Sekretariat Panitia Khusus	V	

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	UNIT KERJA PENGUSUL	PENGEMBANGAN	PEMBANGUNAN BARU
		website Panitia Khusus antara lain tentang Panitia Khusus, Sekretariat Panitia Khusus, RUU yang sedang dibahas, RUU yang sudah dibahas, Non RUU yang sedang dibahas, Non RUU yang sudah dibahas, serta berita DPR terkait Panitia Khusus.			
4	SIAPARAT	SIAPARAT merupakan Sistem informasi Administrasi Penyelenggaraan Rapat yang digunakan untuk dokumentasi dari laporan informasi administrasi penyelenggaraan rapat DPR RI.	Bagian Sekretariat Badan Anggaran	V	
5	SICAPING	SICAPING (perencanaan.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi penyusunan <i>cash planning</i> . Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan informasi penyusunan <i>cash planning</i> yang dimuat dan dikelola pada laman website (perencanaan.dpr.go.id).	Bagian Perencanaan	V	
6	Laporan Kundapil (SIGOTA)	SIGOTA (sigota.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi anggota dewan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan sistem informasi anggota dewan yang dimuat dan dikelola pada laman website DPR RI.	Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi	V	
7	SIKADAL	SIKADAL (tvr.dpr.go.id) adalah sebuah sistem aplikasi data alat liputan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan informasi penyusunan data alat liputan yang dimuat dan dikelola pada laman website TVR.	Bagian Televisi dan Radio Parlemen	V	
8	SILOPER	SILOPER (perjadin.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi loket perjalanan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan sistem informasi loket perjalanan yang dimuat dan dikelola.	Bagian Perjalanan	V	

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	UNIT KERJA PENGUSUL	PENGEMBANGAN	PEMBANGUNAN BARU
9	SIPENJAGARB	SIPENJAGARB (sipenjagarb.dpr.go.id) adalah sebuah Sistem Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan Sistem Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang dimuat dan dikelola pada laman website RB Setjen DPR.	Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V	
10	SIPERDANA	Aplikasi SIPERDANA merupakan Sistem Informasi Persidangan Paripurna yang digunakan untuk kebutuhan Persidangan Paripurna seperti dokumentasi bahan rapat, berita acara serah terima, undangan, serta daftar hadir Persidangan Paripurna.	Bagian Persidangan Paripurna	V	
11	SIRESTI	Aplikasi SIRESTI adalah Sistem Reset Password Mandiri yang digunakan untuk mengatur ulang kata sandi para pengguna Portal Pegawai Setjen DPR RI tanpa perlu menghubungi operator Helpdesk Pustekinfo. SIRESTI dirancang untuk digunakan semudah mungkin oleh pengguna, kapan pun dan di mana pun, namun tetap aman dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.	Pustekinfo		V
12	STELA	Aplikasi STELA adalah Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan yang digunakan untuk mengelola permintaan layanan teknologi informasi yang ditujukan ke Pusat Teknologi Informasi, dengan tiga fungsi utama yaitu sistem tiket digital, eskalasi layanan, dan sistem <i>rating</i> .	Pustekinfo	V	
13	SINGA RUSIA	Aplikasi SINGA RUSIA adalah Sistem Pengajuan Pembaharuan Aplikasi dan Sistem Informasi yang digunakan untuk menampung	Pustekinfo	V	

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	UNIT KERJA PENGUSUL	PENGEMBANGAN	PEMBANGUNAN BARU
		pengajuan permohonan pembuatan/pembaharuan aplikasi serta memonitoring perkembangan pembuatan atau pembaharuan aplikasi.			
14	SIPEDANG	Aplikasi SIPEDANG adalah Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan langsung yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan dan proses pengadaan langsung.	Pustekinfo		V
15	SIMATA	Aplikasi SIMATA adalah Sistem Informasi Manajemen Talenta yang digunakan untuk mengetahui pegawai yang sudah divisualisasi dengan dipetakan sesuai dengan potensi dan kinerja agar menjadi acuan keputusan untuk pengaturan dalam kepegawaian.	Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN		V
16	KBS	Aplikasi KBS adalah <i>Knowledge Based System</i> yang digunakan untuk berbagi informasi pengetahuan (<i>sharing knowledge</i>) yang terintegrasi satu pintu.	Pustekinfo		V
17	SIRIH	SIRIH (sirih.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi risalah DPR RI. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan informasi risalah yang dimuat dan dikelola pada laman website DPR.	Bagian Risalah	V	
18	Dashboard Analitik	Dashboard Analitik merupakan aplikasi yang menampilkan sekumpulan data parlemen seperti kinerja anggota, sentimen sosial media terhadap anggota, risalah rapat dan beberapa data lainnya yang mendukung fungsi-fungsi DPR. Data disajikan dalam bentuk diagram maupun infografis yang dapat diakses oleh masing-masing anggota	Pustekinfo		V

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	UNIT KERJA PENGUSUL	PENGEMBANGAN	PEMBANGUNAN BARU
		dan AKD untuk memudahkan dalam melakukan analisa.			
19	SIMFONI BANGGAR	SIMFONI merupakan Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI yang berfungsi sebagai cloud repository untuk meningkatkan aksesibilitas data dan informasi antara AKD dan Mitra kerjanya.	Bagian Set. Banggar	V	
20	Bale Aspirasi	Bale Apirasi adalah aplikasi mobile yang menyajikan beragam layanan konten parlemen dari seluruh kanal anggota DPR RI dan berbagai informasi lainnya yang disajikan dalam berbagai format.	Pustekinfo		V

3.4. Sasaran Program Meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi”.

3.4.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja :				
Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi				
Target Renstra Tahun 2022	Target PK Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Kategori
3,15	3,10	3,31	106%	Sangat Tinggi

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi diperoleh melalui survei kepuasan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 dengan kategori teknologi informasi yang memberikan hasil yakni 3,31 dari target sebesar 3,10. Sehingga

indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah terlaksana melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022 dengan pencapaian sebesar 106%.

3.4.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 26 Perbandingan Capaian Indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi dari tahun ke tahun

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3,00	3,16	105%	3,10	3,23	104%	3,10	3,31	106%

Perbandingan capaian dari indikator “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi” selama tiga tahun terakhir menunjukkan selalu tercapai target yang ditetapkan dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 106%.

Adapun faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi ini adalah hasil dari tindaklanjut pada survei sebelumnya terkait dukungan teknologi informasi, peningkatan kualitas dan kecepatan akses internet untuk kelancaran penyelenggaraan rapat dan persidangan secara virtual.

3.4.3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 27 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi			
Indikator: Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi			
Realisasi 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	Kategori
3,31	3,22	102%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi” pada tahun 2022 sebesar 3,31.

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 maka tingkat kemajuannya sebesar 102% atau telah tercapai.

3.4.4. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3.4.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 28 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,10	3,31	106%	Faktor pendukung keberhasilan, yaitu: a.adanya peningkatan kapasitas bandwidth internet; b.kecepatan dan ketepatan dalam penanganan gangguan layanan teknologi informasi.	a. menindaklanjuti rekomendasi dan masukan dari Anggota DPR terkait layanan pusat teknologi informasi; b. meningkatkan kompetensi dan skill dari pegawai Pusat Teknologi Informasi; c. melakukan riset kebutuhan teknologi informasi parlemen dengan perkembangan teknologi terkini.

3.4.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Terkait analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tidak ada penggunaan anggaran pada kegiatan pemenuhan indikator kinerja “Indeks kepuasan

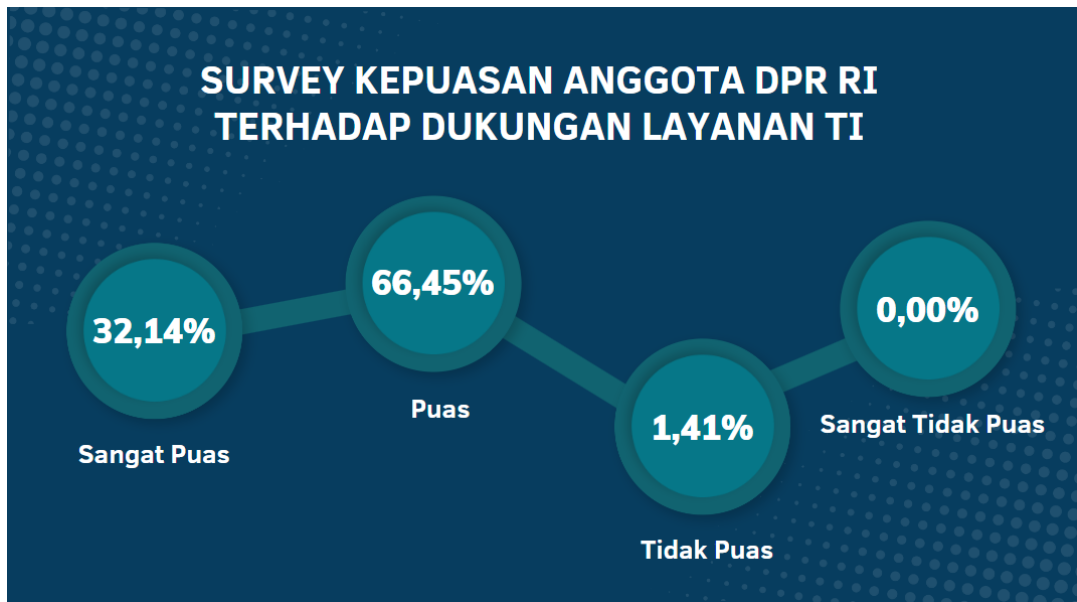
Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi” di lingkup tugas Pusat Teknologi Informasi.

3.4.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Layanan teknologi informasi yang disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi bagi Anggota DPR RI diantaranya sebagai berikut:

- a. Layanan jaringan internet;
- b. Layanan email dengan domain @dpr.go.id;
- c. Layanan *cloud storage*;
- d. Layanan website DPR RI;
- e. Layanan SMS dan WA *Gateway*;
- f. Layanan aplikasi SIPERDANA dan SIMFONI untuk mendukung pelaksanaan persidangan dan rapat kerja;
- g. Layanan analitik data untuk Anggota DPR;
- h. Layanan penyelenggaraan persidangan dan rapat virtual;
- i. Layanan penanganan gangguan jaringan internet.

Hasil survei kepuasan Anggota DPR RI atas layanan teknologi informasi melampaui target yang ditetapkan. Pada indikator Indeks Kepuasan Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai 3,28 dan Indeks Kepuasan Produk Spesifikasi Jenis Layanan mendapatkan nilai 3,23. Secara keseluruhan, nilai kepuasan terhadap layanan yang disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi diperoleh dari indikator survei Evaluasi Kinerja Layanan Berdasarkan Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi memperoleh nilai indeks kumulatif 3,31 atau 82,75 untuk nilai interval konversinya dan masuk kategori “Baik”.



Gambar 10 Diagram Survei Kepuasan Pustekinfo

3.5. Sasaran Program Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi”.

3.5.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja : Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi			
Target PK Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Kategori
93%	99,41%	106%	Sangat Tinggi

Pada dokumen RKT untuk kegiatan 5795-Pengelolaan Teknologi Informasi pada unit organisasi Pusat Teknologi Informasi ditetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 92,5%, namun karena pada indikator kinerja lainnya diselaraskan dengan target pada tahun 2021 maka untuk indikator persentase realisasi anggaran juga diselaraskan menjadi 93% pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022. Selain itu Pusat Teknologi Informasi juga mendapatkan anggaran biaya tambahan (ABT) pada

tahun 2022 sehingga terdapat perbedaan jumlah alokasi anggaran pada RKT dengan DIPA.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pusat Teknologi Informasi merealisasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp. 72.748.422.000,-. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 431.070.256,- sehingga apabila dihubungkan dengan target yang ingin dicapai pada indikator “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi” pada Tahun 2022, diperoleh nilai capaian realisasi anggaran sebesar 106%.

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi Tahun 2021 dan 2022

2021			2022		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
152.111.153.000	150.918.053.567	99,22	72.748.422.000	72.317.351.744	99,41

(Sumber: Pusat Teknologi Informasi, 2022)

Pagu anggaran Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 72.748.422.000,-. Realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 72.317.351.744,- atau 99,41%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2021, maka terjadi peningkatan sebesar 0,19%.

3.5.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 31 Perbandingan Capaian Indikator Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi dari tahun ke tahun

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian	Target
2022	72.748.422.000	72.317.351.744	99,41%	93%
2021	152.111.153.000	150.918.053.567	99,22%	92,5%
2020	22.259.214.000	20.693.678.175	92,97%	90%

Perbandingan capaian dari indikator “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi” selama tiga tahun terakhir menunjukkan selalu mencapai

target dan terdapat peningkatan realisasi capaian dari target tahun sebelumnya. Capaian realisasi anggaran pada tahun 2022 diperoleh sebesar 99,41%.

3.5.3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Terkait dengan indikator Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi, tidak terdapat perbandingan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, karena indikator Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi tidak tercantum pada Renstra Setjen DPR RI 2020-2024. Namun jika disandingkan dengan target yang terdapat pada Renja K/L Tahun Anggaran 2022 unit organisasi Pusat Teknologi Informasi yang memiliki target sebesar 92,5% maka mendapat tingkat kemajuan sebesar 107,4% (sangat tinggi).

Tabel 32 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi			
Indikator: Persentase Aplikasi yang Terintegrasi			
Realisasi 2022	Target Renja K/L 2022	Tingkat Kemajuan	Kategori
99,41%	92,5%	107,4%	Sangat Tinggi

3.5.4. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat standar nasional perbandingan anggaran layanan teknologi informasi untuk indikator kinerja “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi” dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3.5.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 33 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	93%	99,41%	106%	Faktor keberhasilan antara lain: a. Evaluasi atas setiap capaian kinerja dan anggaran setiap triwulan; b. Perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan atas mekanisme dan prosedur kerja; c. Perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi.	Segera mencari solusi untuk kegiatan yang belum maksimal capaian kinerja dan anggarannya.

3.5.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 34 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	93%	99,41%	106%	72.748.422.000	72.317.351.744	99,41%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi” dengan indikator kinerja “Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 99,41% dengan persentase capaian anggaran yakni 106%.

3.5.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian persentase realisasi anggaran pada Pusat Teknologi Informasi yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan didukung oleh penggunaan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan jasa konsultan untuk evaluasi RITIK, Gap Analisis Keamanan Informasi, Penyusunan Arsitektur Data, dan Redesain website DPR RI;
- b. Kegiatan Sosialisasi SOP Service Desk Tata Kelola Teknologi Informasi dan Sosialisasi Security Awareness;
- c. Rapat-rapat koordinasi antar bidang di Pusat Teknologi Informasi, antar unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maupun dengan K/L/I lainnya dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi seperti penyusunan kebijakan teknologi informasi, pengisian indeks keamanan informasi, indeks kematangan insiden siber, penilaian mandiri SPBE, dan audit teknologi informasi;
- d. Seminar/*workshop* teknis untuk pengembangan kompetensi pranata komputer seperti *workshop* Tableau, ITSM ISO 20000, dan UI/UX *Design*;
- e. Pelaksanaan studi implementasi dalam rangka Pengelolaan Layanan SPBE dan Portal Satu Data ke beberapa pemerintah daerah, diantaranya Diskominfo Kota Banyuwangi, Diskominfo Kota Cirebon, dan Diskominfo Kota Tangerang;
- f. Perjalanan dinas dalam rangka *monitoring data center* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring penerapan SOP Data Center Colocation di Telkom Sigma dan Colocation di Taman Tekno Lintasarta, Serpong;

- g. Pembiayaan honor Tim Pengelola *Command Center* DPR RI, Tim Pengelola SPBE, Tim Penyusunan SOP Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Panitia Pemilihan Barang/jasa;
- h. Langganan Jasa Internet DPRRI, Langganan Jasa Internet DPRRI dua, Langganan Jasa Internet DPRRI tiga, Langganan Jasa Internet Setjen DPRRI, dan Langganan Jasa Internet *Colocation*;
- i. Pengadaan peralatan penunjang jaringan kabel dan nirkabel, Pengadaan Kabel LAN, Pengadaan peralatan penunjang jaringan kabel dan nirkabel, Pengadaan *Monitoring Device*, Pengadaan *Wireless Access Point*, Pengadaan Perangkat DNS, DHCP dan *IP Address Management (DDI)*, Pengadaan Peralatan *E-KTP Reader*, Pengadaan *Distribution Switch*, Pengadaan OCR, Pengadaan Perangkat Keamanan Distribusi Jaringan, Pengadaan Perangkat *Backup*, Pengadaan *Unity Upgrade*, Pengadaan *Powerstore Upgrade*, Pengadaan Server, Pengadaan *Storage*, Pengadaan SAN Switch, Pengadaan *Software Backup*, Pengadaan Peralatan Jaringan helpdesk, Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer Jaringan, dan Pengadaan Cloud;
- j. Perawatan Penyimpanan Komputasi Parlemen, Pemeliharaan *Wireless Acces Point*, Pemeliharaan AC Ruang Server, Pemeliharaan UPS Ruang Server, Pemeliharaan Peralatan Pengamanan Kebakaran Ruang Server, Pemeliharaan *Switch Access*, dan Pemeliharaan Server;
- k. Pengadaan *Renewal Subscription Firewall Data Center*, Pengadaan *Web Application Firewall*, Lisensi Zoom Webinar dan Paripurna, Lisensi Zoom DPR RI 35 *Host*, Lisensi Zoom DPR RI 42 *Host*, Pengadaan *Subscription Link Controller*, Pengadaan *Email Security Virtual Appliance*, Pengadaan *End Point Respond Server*, Pengadaan Anti Virus Berlisensi, Pengadaan *Renewal Subcription* Pusat Analitik Parlemen;
- l. Layanan Informasi melalui *SMS Gateway* Anggota DPR RI, *SMS Gateway* Anggota DPR RI Setjen DPRRI, Layanan Informasi melalui *WA Gateway* Anggota DPR RI, Layanan Informasi melalui *WA Gateway* Setjen DPRRI;
- m. Sewa Ruang Penyimpanan Dokumen Terpadu dan Sewa Ruang Penyimpanan Data Parlemen;

- n. Pengembangan Jaringan kabel Nusantara I, Pengembangan jaringan FO, Pengembangan jaringan Komplek DPR RI, Pengembangan dan Perapihan jaringan Internet;
- o. Perjalanan Dinas Dalam Kota (Rumah pimpinan, RJA Kalibata, dan RJA Ulujami), Perjalanan dinas dalam Rangka Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan IT (Wisma Griya Sabha Kopo, Data Center Telkom Sigma, dan Data Center Taman Tekno), dan perjalanan dinas untuk *workshop*.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pusat Teknologi Informasi yang ini telah memasuki tahun keduanya dalam susunan struktur organisasi yang baru mempunyai tugas melaksanakan tata kelola teknologi informasi, pengelolaan system informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang membawahi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrstruktur Teknologi Informasi, dengan masing-masing bidang memiliki kelompok jabatan fungsional Pranata Komputer.

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022 disusun berdasarkan kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang dilakukan oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Teknologi Informasi. Laporan ini menyajikan keberhasilan, capaian maupun kendala yang dihadapi oleh segenap jajaran yang berada dalam unit kerja ini selama tahun anggaran 2022. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin baik dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja yang diturunkan dari sasaran program dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi.

Pada 2022, Kepala Pusat Teknologi Informasi memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang diturunkan kedalam sasaran program Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi. Indikator kinerja ini direpresentasikan dalam bentuk capaian *outcome*. Secara umum, tingkat keberhasilan kinerja kegiatan Pusat Teknologi Informasi tampak pada pencapaian realisasi yang sesuai dengan target. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2022 dapat dilakukan sesuai target ditengah kondisi pemulihan paska pandemi Covid-19 dan PPKM.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Teknologi Informasi yang telah dilakukan oleh dua Bidang unit kerja yakni Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi memberikan kenaikan capaian realisasi penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2022 dengan capaian sebesar 99,41% dan realisasi anggaran keseluruhan Rp 77.317.351.744,-.

Bertujuan dalam mengantisipasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi agar tercapai kinerja yang ditargetkan, maka Kepala Pusat Teknologi Informasi menetapkan kebijakan antara lain:

- a. melakukan identifikasi tentang rencana kegiatan dan penyusunan anggaran baik untuk tahun yang akan datang maupun revisi anggaran pada tahun berjalan;
- b. berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja dan penyelarasan dengan target rencana strategis organisasi;
- c. penyusunan anggaran yang terintegrasi dengan kegiatan antar bidang di lingkungan Pusat Teknologi Informasi terkait dengan kegiatan pengelolaan layanan teknologi informasi ataupun pengembangan kompetensi kepranataan komputer;
- d. memastikan setiap usulan kegiatan mempunyai *outcome* dan *output* yang jelas;
- e. memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) dengan dokumentasi yang teratur dan baik;
- f. memastikan pelaksanaan dan tindak lanjut dari rapat koordinasi dilakukan secara efektif.

4.2. Rekomendasi

Hasil capaian dari indikator kinerja Pusat Teknologi Informasi sudah melampaui target dengan kategori capaian “sangat tinggi”. Namun perlu ada perbaikan yang berkelanjutan untuk keberhasilan kinerja di tahun depan. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan diantaranya:

- a. Mempertimbangkan komposisi Analisis Beban Kerja (ABK) dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pusat Teknologi Informasi;
- b. Memperhatikan Renstra Setjen DPR RI, Renja K/L, dan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam menyusun penetapan target indikator kinerja ditahun berjalan, agar perbandingan capaian yang dihasilkan dapat selaras;
- c. Memperhatikan sasaran program dan indikator kinerja pada dokumen Renja K/L dan Perjanjian Kinerja untuk diturunkan dalam kode program/*output* kegiatan agar selaras dengan pencapaian indikator kinerja sehingga dapat dianalisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dayanya;
- d. Pengembangan Pusat Data Analitik dan *Command Center* DPR RI harus tetap dilakukan secara berkesinambungan dalam mengolah data dan penyajian analitiknya melalui suatu *executive dashboard* sebagai referensi dalam mendukung pengambilan keputusan pimpinan;
- e. Penerapan Satu Data DPR RI sebagai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka membangun kolaborasi dengan K/L/I eksternal untuk meningkatkan koleksi sumber data;
- f. Pusat Teknologi Informasi yang memegang peranan penting dalam penyediaan akses internet di seluruh gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka perlu memperbaiki dan meningkatkan kecepatan akses internet dalam menunjang produktivitas kerja berbasis digital dengan didukung oleh spesifikasi perangkat teknologi informasi yang mutakhir;
- g. Senantiasa melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait teknologi informasi yang diselaraskan dengan standar internasional (ISO) dan praktik terbaik dalam pengelolaan teknologi informasi tentang keamanan informasi, pengelolaan aplikasi, serta pengelolaan infrastruktur dan pusat data;

- h. Pusat Teknologi Informasi untuk dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mengajukan usulan untuk penambahan unit kerja Bidang Aplikasi Sistem Informasi dalam mewujudkan rencana layanan SPBE yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi tematik digitalisasi layanan pemerintah melalui pembangunan/pengembangan, integrasi dan kolaborasi dengan aplikasi umum berbagi pakai.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2021
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

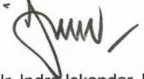
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
NIP. 19650705 199103 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	1. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik
2.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	1. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85%
		2. Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi dan Informasi	3,10
		4. Persentase realisasi anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi	93%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp.57.365.474.000,-

Sekretaris Jenderal,


Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
 NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 21 Desember 2021
 Kepala Pusat Teknologi Informasi,


Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
 NIP. 19650705 199103 1 003



LAMPIRAN 2

SURAT TUGAS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B/309/PR.05.04/12/2022

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pegawai di lingkungan Pusat Teknologi Informasi.
- b. bahwa untuk penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.
- Menimbang : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021;


Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	JABATAN
1.	Agus Nuryadin, S.Sos.	196808081997031002	Kasubag. TU Pustekinfo
2.	Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I.	198506102009122003	Pranata Komputer Ahli Muda
3.	Awang Eko Feryanto, S.Kom.	198211052003121004	Pranata Komputer Ahli Muda
4.	Wandita Judith Stephanie Simangunsong, A.Md.Kom.	199706142019032001	Pranata Komputer Terampil
5.	Bagus Tri Astadi, S.T.	199505312022021001	Pranata Komputer Ahli Pertama
6.	Astari Khaniasty, S.Kom	199010152022032001	Pranata Komputer Ahli Pertama
7.	Tri Ari Pujirahayu	197604021996032001	Penyusun Bahan Kebijakan

Untuk : melakukan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022.

Jakarta, 21 Desember 2022
Kepala Pusat Teknologi Informasi,


Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
NIP. 196507051991031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
 2. Plh. Kepala Biro Organisasi & Perencanaan
 3. Kepala Bidang Sistem Informasi & Infrastruktur TI
 4. Kepala Bidang Tata Kelola TI
 5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN 3

SURAT TUGAS SDM PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

DAFTAR PENERIMA PERINTAH PENUGASAN DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

1. BIDANG SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI (SI-INTI)

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Kepala Bidang SI-INTI
2.	Evlin Haditama, S.T.	198210172009121001	Pranata Komputer Madya (Senior Network Administrator)
3.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya (Senior Programmer)
4.	Setiadji Sardjugitojo, S.Sos	196807011988031001	Pranata Komputer Muda (Senior Network Engineer)
5.	Awang Eko Feryanto, S.Kom.	198211052003121004	Pranata Komputer Muda (Senior Network Engineer)
6.	Ibrahim, S.T.	198310092009121001	Pranata Komputer Muda (Senior Network Security)
7.	Gery Kresna Putra Pangestu H, A. Md. Kom.	199707032019031001	Pranata Komputer Pelaksana (Junior Network Administrator)
8.	Lukman Hakim, A.Md.	199210292020121001	Pranata Komputer Pelaksana (Junior Network Engineer)
9.	Muhammad Sasmito Adi Wibowo, A. Md.	199510032019031001	Pranata Komputer Pelaksana (Junior Programmer)

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
10.	Bahrul Faizi, S.Kom.	199811062022021001	Pranata Komputer Pertama (Junior Mobile Programmer)
11.	Ahmad Riyadi, S.T.	199602212022021001	Pranata Komputer Pertama (Junior UI/UX Web Designer)
12.	Ibnu Hisyam Al-Lathif, A.Md.Kom	199706252022021001	Pranata Komputer Terampil (Junior Programmer)

2. BIDANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TKTI)

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. Anita Handyaniputri, S.T., M.T.	198201022005022002	Kepala Bidang TKTI
2.	Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Madya (Senior IT Governance)
3.	Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I	19850612009122003	Pranata Komputer Muda (Senior IT Governance)
4.	Riza Kurniawan, S.Kom., M.T.	197404042009121004	Pranata Komputer Muda (Senior Information Security Management)
5.	Tisa Selma, S.T., M.Eng.	198608222009122002	Pranata Komputer Muda (Senior Information Security Management)
6.	Wiranto Utomo, S.Si., M.Kom.	197505132009121001	Pranata Komputer Muda (Senior Data Digital Management)
7.	Yan Setyawan, S.Kom.	198306262009121005	Pranata Komputer Muda (Senior Data Digital Management)
8.	Wandita Judith Stephanie Simangunsong, A.Md.Kom	199706142019032001	Pranata Komputer Pelaksana

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
			(Junior IT Governance)
9.	Devy Irawan, A. Md.	199212242020121002	Pranata Komputer Pelaksana (Junior Data Digital Management)
10.	Ronny Virgian, S.Kom	199108242022021001	Pranata Komputer Pertama (Junior Information Security Management)
11.	Bagus Tri Astadi, S.T.	199505312022021001	Pranata Komputer Pertama (Junior Information Security Management)
12.	Astari Khaniasty, S.Kom	199010152022032001	Pranata Komputer Pertama (Junior IT Governance)
13.	Soffan Hadi Bahrudin, A.Md	199803292022021001	Pranata Komputer Terampil (Junior Data Digital Management)

3. TABEL KOMPETENSI PRANATA KOMPUTER PUSTEKINFO

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
1.	Senior Network Administrator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan validasi dan verifikasi konfigurasi peralatan jaringan - Melakukan validasi solusi dalam penanganan kesalahan dalam konfigurasi jaringan - Memonitoring status jaringan 	10 tahun	S1/S2 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	CCNA, CCNP, CCIE, MTCNA, MTCRE, MTCWE, RCNA (Ruckus Certified Networking Associate), RCWA (Ruckus Certified Wi-fi Associate)

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Merancang dan mengimplementasi solusi konfigurasi jaringan - Membuat usulan spesifikasi untuk kebutuhan perangkat/teknologi konfigurasi jaringan yang terkini - Memaksimalkan kinerja jaringan melalui pemantau dan pemecahan masalah berkelanjutan 			
2.	Senior Programmer	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standar kode-kode program yang konsisten, rapi, dan tidak berulang (fleksibel/reusable) - Menyusun standar kode program yang efisien dan siap terhadap perubahan (maintenance) - Melakukan verifikasi dan validasi terhadap program proyek yang 	10 tahun	S1/S2 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	Associate Android Developer, Mobile Web Specialist, Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect, Google Cloud Certified - Professional Data Engineer, Microsoft Mobility, Cloud, Productivity, Data, App Builder, dan Business Certified, AWS Certified

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<p>dikerjakan oleh Junior Programmer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan validasi solusi atas problem solving terhadap bug/error dalam bahasa pemrograman dan historinya 			<p>Developer, AWS Certified SysOps Administrator, dan AWS Certified DevOps Engineer, Unity Certified Developer, Laravel Certified</p>
3.	Senior Network Engineer	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan validasi dan verifikasi instalasi peralatan jaringan - Melakukan validasi solusi terhadap kesalahan dalam instalasi jaringan - Memonitoring status instalasi jaringan kepada pemangku kebijakan - Merancang dan mengimplementasikan solusi pemasangan jaringan baru atau 	10 tahun	S1/S2 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	CCNA, CCNP, CCIE, MTCNA, MTCRE, MTCWE, RCNA (Ruckus Certified Networking Associate), RCWA (Ruckus Certified Wi-fi Associate)

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<p>memperbaiki jaringan yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat usulan spesifikasi untuk kebutuhan pengadaan peralatan instalasi jaringan yang terkini - - - Memaksimalkan kinerja instalasi jaringan melalui pemantau dan pemecahan masalah berkelanjutan 			
4.	Senior Network Security Engineer	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan keamanan jaringan tetap terjaga - Merancang dan menerapkan strategi terbaik untuk melindungi jaringan internal perusahaan dari akses yang tidak diinginkan 	10 tahun	S1/S2 Rekayasa Keamanan Siber / Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	CEH, Comptia Security+, CHFI, CND

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendeteksi, menyelidiki, memasang firewall dan mencegah gangguan serta menyelesaikan masalah keamanan jaringan - Melakukan pengujian, penilaian keamanan, dan analisis risiko, kemudian melaporkan temuan, mengevaluasi langkah-langkah keamanan baru, dan membuat rekomendasi keamanan - Membuat algoritma yang mengatur proses untuk otentikasi, otorisasi dan enkripsi - Mengawasi perubahan pada jaringan dan penyebaran perangkat lunak untuk 			

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		memastikan perlindungan jaringan			
5.	Senior IT Governance	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan dan menyusun kebijakan/pedoman/standar/SOP/juknis layanan teknologi informasi - Merumuskan dan menyusun perencanaan, strategi, dan roadmap layanan teknologi informasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang - Melakukan verifikasi dan validasi teknik evaluasi kebijakan/pedoman/standar/SOP/juknis layanan teknologi informasi - Melakukan verifikasi dan validasi proses evaluasi/ases 	10 tahun	S1/S2 Manajemen Teknologi Informasi / Sistem Informasi / Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	ITIL, COBIT, CGEIT, CISA

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<p>men tingkat kematangan layanan teknologi informasi system pemerintahan berbasis elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rekomendasi pengembangan/integrasi/interoperabilitas antar layanan teknologi informasi melalui system penghubung layanan - Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam menindaklanjuti kerangka kerja integrasi/interoperabilitas system penghubung layanan 			
6.	Senior Information Security Analyst	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan terhadap terjadinya insiden dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam 	10 tahun	S1/S2 Rekayasa Keamanan Siber / Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik	CISM, CISSP, GSEC, SSCP, OSCP

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<p>penanganan insiden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis tiket insiden, memantau penanganan insiden dan ancaman keamanan dalam suatu organisasi, serta bertugas untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengamanan informasi - Merumuskan dan menyusun kebijakan keamanan data dan informasi organisasi - Melakukan evaluasi kebijakan keamanan data dan informasi terbaru dan menerapkannya untuk melindungi jaringan - Melakukan evaluasi/asesmen tingkat 		Komputer / Ilmu Komputer	

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		kematangan keamanan informasi dan insiden siber			
7.	Senior Data Analyst	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan dan menyusun standar metadata dan format data - Melakukan verifikasi dan validasi hasil identifikasi daftar data organisasi - Melakukan verifikasi dan validasi tipe dan kategori data - Menemukan insight bisnis dari data - Memberikan rekomendasi kebutuhan koleksi data set baik internal maupun eksternal, terstruktur maupun tidak terstruktur - Menginterpretasikan pemodelan data untuk kebutuhan 	10 tahun	S1/S2 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer / Matematika / Komputasi Statistik	Data CompTIA+, Cloudera, CAP, AWS Certified Data Analytics, SAS® Certified Data scientist, Google Cloud Certified - Professional Data Engineer

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		pengambilan keputusan pimpinan			
8.	Junior Network Administrator	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang, mengkonfigurasi dan mendukung peralatan jaringan - Melakukan identifikasi adanya kesalahan dalam jaringan - Melaporkan status jaringan kepada pemangku kebijakan - Memperbaharui peralatan jaringan ke rilis firmware yang lebih baru 	1 tahun	D3 / S1 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	CCNA, CCNP, CCIE, MTCNA, MTCRE, MTCWE, RCNA (Ruckus Certified Networking Associate), RCWA (Ruckus Certified Wi-fi Associate)
9.	Junior Network Engineer	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan instalasi peralatan jaringan - Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap kesalahan dalam instalasi jaringan 	1 tahun	D3 / S1 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	CCNA, CCNP, CCIE, MTCNA, MTCRE, MTCWE, RCNA (Ruckus Certified Networking Associate), RCWA (Ruckus Certified Wi-fi Associate)

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan status instalasi jaringan kepada pemangku kebijakan - Mengimplementasikan solusi pemasangan jaringan baru atau memperbaiki jaringan yang ada - Melakukan update perangkat lunak / versi perangkat jaringan 			
10.	Junior Programmer	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang flowchart / diagram alir yang menggambarkan algoritma, alur kerja, atau proses dari suatu program - Melakukan coding program dengan Bahasa pemrograman yang sesuai 	1 tahun	D3 / S1 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	Associate Android Developer, Mobile Web Specialist, Google Cloud Certified, Microsoft Mobility, Cloud, Productivity, Data, App Builder, dan Business Certified, AWS Certified Developer, AWS Certified SysOps Administrator

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>debugging</i> (pengujian) proses menemukan dan menghapus bug atau error untuk memungkinkan program dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan 			<p>, dan AWS Certified DevOps Engineer, Unity Certified Developer, Laravel Certified</p>
11.	Junior UI/UX Web Designer	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan riset pengguna - Menciptakan persona dan arsitektur informasi pada website dan aplikasi - Mengembangkan user flows dan wireframe - Membuat prototipe dan menjalankan beberapa tes pengguna - Membuat desain visual, infografis dan berkoordinasi dengan programmer 	1 tahun	D3 / S1 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer / Sistem Informasi	UI/UX Certified, Design Thinking, Usability, User Center Design, Persona

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
12.	Junior IT Governance	<ul style="list-style-type: none"> - Mendokumentasikan penyusunan kebijakan/pedoman/standar/SOP/juknis layanan teknologi informasi - Mendokumentasikan penyusunan rencana, strategi, dan roadmap layanan teknologi informasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang - Melakukan evaluasi kebijakan/pedoman/standar/SOP/juknis layanan teknologi informasi - Melakukan evaluasi/asesmen tingkat kematangan layanan teknologi informasi system pemerintahan 	1 tahun	D3 / S1 Manajemen Teknologi Informasi / Sistem Informasi / Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		berbasis elektronik			
13.	Junior Data Engineer	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi daftar data yang dihasilkan oleh organisasi - Menganalisis dan memetakan tipe dan kategori data - Melakukan cleansing data dan penyesuaian format - Membuat pemodelan dan visualisasi data 	1 tahun	D3 / S1 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer / Matematika / Komputasi Statistik	Data CompTIA+, Cloudera, CAP, AWS Certified Data Analytics, SAS® Certified Data scientist, Google Cloud Certified - Professional Data Engineer
14.	Junior Information Security Analyst	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat tiket insiden, atau ancaman keamanan data dan informasi dalam suatu organisasi - Melaksanakan prosedur-prosedur pengamanan informasi - Mendokumentasikan proses penyusunan 	1 tahun	D3 / S1 Rekayasa Keamanan Siber / Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		<p>kebijakan keamanan data dan informasi organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan kebijakan keamanan informasi untuk melindungi jaringan - Mendokumentasikan proses evaluasi/asesmen tingkat kematangan keamanan informasi dan insiden siber 			
14.	Junior Mobile Programmer	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang flowchart / diagram alir yang menggambarkan algoritma, alur kerja, atau proses dari suatu program - Melakukan coding program dengan Bahasa pemrograman yang sesuai - Melakukan <i>debugging</i> (pengujian) 	1 tahun	D3 / S1 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	Associate Android Developer, Mobile Web Specialist, Google Cloud Certified - Cloud Architect, Microsoft Mobility, Cloud, Productivity, Data, App Builder, dan Business Certified

No	JABATAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TMT (MASA KERJA)	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI
		proses menemukan dan menghapus bug atau error untuk memungkinkan program dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan			

4. TATA USAHA PUSTEKINFO

No	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1.	Agus Nuryadin, S.Sos	196808081997031002	Kepala Sub Bagian Pustekinfo	
2.	Tri Ari Pujirahayu	197604021996032001	Penyusun Bahan Kebijakan	Penugasan pada TU Pustekinfo
3.	Endang Mulus Rahayu, S. Kom	197407142000031001	Pengelola Data	Penugasan Pada TU Bidang Sistem Informasi Dan Infrastruktur Teknologi Informasi (SI-INTI)



Sekretariat Jenderal DPR RI
Pusat Teknologi dan Informasi
©2023

